

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya.

Rencana kerja (renja) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Renja KESBANGPOL) Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun. Renja memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 dan perkiraan capaian tahun 2018, program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2020.

Renja Kesbangpol Tahun 2020 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, karena Renja Kesbangpol Tahun 2020 pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021. Dengan demikian, Renja Kesbangpol Tahun 2020 adalah pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Penetapan Prioritas Plafon Anggaran Sementara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana pembangunan daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 (Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020) sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2020.

Oleh sebab itu, karena tahun 2020 merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021 dan Renstra Perubahan Kantor Kesbangpol Tahun 2016-2021, maka untuk menyusun RKPD dan Renja Kesbangpol, harus mempedomani:

- 1) RPJPN Tahun 2005-2025,
- 2) RPJMN Tahun 2014-2020,
- 3) RPJPD Provinsi Sumbar 2005-2025
- 4) RPJMD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021,
- 5) RPJPD Kabupaten Padang Pariaman 2005-2025
- 6) RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021.

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020, merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program dari Renstra Kesbangpol. Sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mendukung pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dibidang urusan kesatuan bangsa dan politik mempunyai fungsi yang sangat strategis antara lain, Perumusan kebijakan teknis dibidang urusan kesatuan bangsa dan politik, Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang urusan kesatuan bangsa dan politik, Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik, Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Rancangan renja SKPD dibahas pada forum SKPD yang dikoordinasikan oleh Bappeda, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai

dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD. Renja SKPD ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang dikoordinir oleh Bappeda. Kemudian Renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2020.

1.2. Landasan Hukum

Yang menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Kesbangpol Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 7) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 12) Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2017-2020;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 16) Permendagri 72 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu;
- 17) Permendagri 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan daerah tahun 2017;
- 18) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 02 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025

- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010-2030;
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 08 Tahun 2011, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010-2017;
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2011, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Padang Pariaman;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kesbangpol disusun untuk memenuhi maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah. Disamping untuk memberikan gambaran tentang program kegiatan pembangunan Kesbangpol tahun 2020 guna mencapai sasaran pembangunan dengan memperhatikan dan menganalisis lingkungan strategis internal maupun eksternal.

Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kesbangpol adalah :

- 1) Untuk memberikan pedoman dan arahan dan penyelarasan program dan kegiatan Kesbangpol.
- 2) Mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan Kesbangpol sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan;
- 3) Menyelaraskan program dan kegiatan Kesbangpol dengan Rencana Pembangunan daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah; dan
- 4) Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD Kabupaten Padang Pariaman.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyajian Renja Kesbangpol disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2018**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1),

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan
- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD (ANALISIS SWOT)

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berisikan uraian mengenai:

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;
- 3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPDP

Berisikan uraian mengenai:

- 1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPDP dengan hasil analisis kebutuhan;
- 2) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- 3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPDP, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPDP, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

- 1) Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
- 2) Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD;

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- 1) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- 2) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - a) Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - b) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - c) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- 3) Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- 1) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- 3) Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2018

1. Gambaran Umum Kinerja SKPD

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2011, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Kesbangpol Kabupaten Padang Pariaman mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman serta melihat latar belakang dan mencermati fenomena - fenomena yang ada, maka visi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah **Terwujudnya Kesadaran Dan Partisipasi Masyarakat Yang Berwawasan Kebangsaan, Demokratis Menuju Kabupaten Padang yang Aman dan Harmonis.**

Pelaksanaan kegiatan Kesbangpol Tahun 2018 secara umum selaras dengan Renja Kesbangpol 2018, namun terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan dikarenakan keterbatasan anggaran pada tahun bersangkutan. Pelaksanaan program dan kegiatan Kesbangpol Tahun 2018 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2018. Renja Kesbangpol pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kesbangpol Kabupaten Padang Pariaman selama tahun 2018 dan perkiraan target tahun 2020.

2. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-

indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dokumen dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

1) Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2018

Sebagaimana ditetapkan dalam APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018 dan DPA Tahun Anggaran 2018, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariamanselaku SKPD memperoleh target alokasi anggaran belanja dengan rincian sebesar **Rp1.826.197.341,46** yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD Perubahan), yang direncanakan untuk membiayai :

• Belanja Pegawai	Rp	846.541.841,46
• Belanja Barang dan Jasa	Rp	971.655.500,00
• Belanja Modal	Rp	8.000.000,00

Capaian kinerja keuangan dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut :

Total Realisasi belanja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman secara keseluruhan hanya sebesar **Rp1.799.265.633,00** atau **98,53%** dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar **Rp1.826.197.341,46**. Realisasi belanja operasi hanya sebesar **Rp1.791.265.633,00** atau **98,52%** dari anggaran belanja operasi yang ditetapkan sebesar **Rp1.818.197.341,46** sedangkan realisasi belanja modal hanya sebesar **Rp8.000.000,00** atau **100,00%** dari anggaran belanja modal yang ditetapkan sebesar **Rp8.000.000,00**.

Seluruh realisasi belanja Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2018 mencapai **98,53%** dari yang dianggarkan. Realisasi belanja tiap program dan kegiatan telah mencapai target kinerja yang ditetapkan.

Hasil Renja Kesbangpol Tahun 2018 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan dapat mencapai target yang ditetapkan. Hal ini

dikarenakan dapat terlaksananya semua kegiatan dan dapat memenuhi output yang diharapkan.

TABEL 2.1.

CAPAIAN DAN EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2018

NO	Uraian	Jumlah Dana	Realisasi	Sisa Dana	%	Capaian Program dan Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	31,209,675	30,437,500	772,175	97.53	Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat Kantor selama 12 bulan
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3,060,325	3,060,325	-	100.00	Terpenuhinya Pembayaran telepon dan listri selama 12 bulan
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	56,000,000	54,840,000	1,160,000	97.93	Meningkatnya Kinerja Keuangan yang akuntabel selama 12 bulan
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	21,600,000	21,600,000	-	100.00	Meningkatnya suasana kerja yang nyaman serta tersedianya peralatan kebersihan kantor selama 12 bulan
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3,500,000	2,340,000	1,160,000	66.86	Meningkatnya wawasan karyawan/karyawati selama 12 bulan
6	Penyediaan Makanan dan Minuman	10,500,000	10,191,500	308,500	97.06	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum rapat/tamu selama 12 bulan
7	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	81,000,000	80,615,075	384,925	99.52	Adanya koordinasi dari tingkat Kabupaten, Dinas Instansi terkait di wilayah Kabupaten selama 12 bulan
8	Penyediaan Jasa Pendukung Perkantoran	61,200,000	61,200,000	-	100.00	Meningkatnya kinerja Swakelola sebanyak 3 (tiga) orang selama 12 bulan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	8,000,000	8,000,000	-	100.00	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Peralatan Gedung Kantor sebanyak 1 (satu) unit berupa Proyektor (Infocus)
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	15,000,000	14,947,500	52,500	99.65	Terpeliharanya Gedung Kantor dalam meningkatkan kenyamanan dalam bekerja selama 12 bulan
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	50,000,000	47,024,500	2,975,500	94.05	Terpenuhinya jasa service, belanja penggantian suku cadang dan BBM dan Pelumas Kendaraan Dinas selama 12 bulan
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	10,000,000	9,972,500	27,500	99.73	Terpeliharanya perlengkapan kantor secara rutin/berkala OPD selama 12 bulan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
13	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20,000,000	16,008,900	3,991,100	80.04	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang cakap dan handal
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						
14	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46,750,000	41,024,127	5,725,873	87.75	Tersedianya laporan LAKIP, LPPD, Renstra, RKA, DPA, Laporan Keuangan Semesteran pada OPD selama 12 bulan
JUMLAH PINDAH KE HALAMAN 02		417,820,000	401,261,927	16,558,073	96.04	

NO	Uraian	Jumlah Dana	Realisasi	Sisa Dana	%	Capaian Program dan Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PINDAHAN DARI HALAMAN 01	417,820,000	401,261,927	16,558,073	96.04	
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan					
15	Kegiatan Operasional komunitas Intelijen Daerah (Peningkatan Penanganan Kantramtibmas di Daerah)	67,490,000	66,620,750	869,250	98.71	Terpeliharanya Stabilitas Keamanan dan Ketertiban di daerah selama 12 bulan
16	Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Daerah Tingkat Kabupaten	279,500,000	276,437,145	3,062,855	98.90	Terpantaunya Gangguan Keamanan Dalam Negeri di Daerah se - Kabupaten Padang Pariaman selama 12 bulan
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan					
17	Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	30,597,400	30,597,400	-	100.00	Meningkatkan Pemahaman Wawasan Kebangsaan bagi Generasi Muda dengan diikuti 70 peserta dari 17 Kecamatan
	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit masyarakat (Pekat)					
18	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	26,767,600	26,767,600	-	100.00	Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba terhadap Generasi Muda Kabupaten Padang Pariaman dengan peserta 70 orang
19	Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HAN) di Kabupaten Padang Pariaman	57,100,600	57,100,600	-	100.00	Terlaksananya Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HAN) bagi ASN, Masyarakat dan Murid- Murid Sekolah di IKK Parit Malintang
	Program Pendidikan Politik Masyarakat					
20	Sosialisasi Politik bagi Pemilih Pemula	28,726,500	28,726,500	-	100.00	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu khususnya untuk pemilih pemula yang sebelumnya belum menggunakan hak pilihnya dengan peserta sebanyak 70 orang
21	Pembinaan dan Pengawasan Bantuan Dana Partai Politik	18,000,000	16,326,800	1,673,200	90.70	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terhadap Bantuan Dana Papol untuk Tahun 2017 sebanyak 11 Papol dan terealisasi sebanyak 11 Papol
22	Pembekalan Pengajuan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Papol	60,675,000	58,565,800	2,109,200	96.52	Terlaksananya Pembekalan Pengajuan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Papol sebanyak 11 Papol dengan peserta 33 orang
23	Updating dan Komputerisasi Data Ormas, Monitoring, dan Evaluasi Ormas/LSM	11,100,000	10,456,700	643,300	94.20	Terpantaunya dan terdatanya Keberadaan Ormas dan LSM di Kabupaten Padang Pariaman selama 12 bulan
24	Dialog Politik Bersama Pimpinan Partai Politik dan Tokoh Masyarakat	37,878,400	37,878,400	-	100.00	Meningkatnya Pengetahuan Tokoh Masyarakat dan Ormas sebanyak 105 orang yang terdiri dari 55 Orang Tokoh Masyarakat dari 17 Kecamatan dan 33 orang dari Pengurus Partai Politik yang mendapatkan Kursi DPRD Padang Pariaman
	JUMLAH	1,035,655,500	1,010,739,622	24,915,878	97.59	

Sebagaimana ditetapkan dalam APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018 dan DPA Tahun Anggaran 2018, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman selaku SKPD memperoleh target pendapatan dan alokasi anggaran belanja dengan rincian sebagai berikut :

2.1.1. Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Tahun 2018

Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 pada Bapelitbangda adalah sebagai berikut:

2.1.1.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini terdiri atas 8 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar **Rp268.070.000,00**. Dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar **Rp264.284.400,00**. Pada umumnya pelaksanaan kegiatan pada program ini telah efisien dan efektif, hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja **98,59%**, hanya beberapa kegiatan yang tidak tercapai targetnya dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Anggaran **Rp31.209.675,00** dan realisasi **Rp30.437.500,00** atau sebesar **97,53%**. Kegiatan Jasa Penyediaan Surat Menyurat dimaksudkan untuk mendukung operasional kantor dalam pelayanan jasa surat menyurat dan lancarnya proses surat menyurat dan administrasi keuangan. Seluruh kebutuhan akan penyelesaian surat menyurat kantor selama tahun 2018 dan penyusunan beberapa laporan berbagai kegiatan rutin serta surat dinas lainnya dapat terpenuhi.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terselenggaranya surat menyurat, Tersedianya Alat Tulis Kantor, barang cetakan, penggandaan (fotocopy),perangko dan materai.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Anggaran **Rp3.060.325,00** dan realisasi **Rp3.060.325,00** atau sebesar **100.00%**. Kegiatan ini dimaksudkan agar sarana komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet kantor dapat digunakan untuk mendukung aktifitas kantor. Kegiatan ini berjalan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dengan terpenuhinya pembayaran jasa komunikasi telepon, listrik dan

internet kantor selama 2 (dua) bulan 2018 dan hasil yang diharapkan pada kegiatan ini adalah lancarnya operasional kegiatan kantor.

c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Anggaran **Rp56.000.000,00** dan realisasi **Rp54.840.000,00** atau sebesar **97,93%**. Kegiatan ini sebagian besar merupakan penyediaan honorarium pengelola keuangan SKPD seperti Honor KPA, PPK, PPTK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang, dan telah dibayar honor dimaksud sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Tahun 2018.

d. Penyediaan Jasa Kebersihan

Anggaran **Rp21.600.000,00** dan realisasi **Rp21.600.000,00** atau sebesar **100%**. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung operasional kantor meliputi penyediaan jasa pelayanan kebersihan kantor dan lingkungan kantor dan belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih. Selama Tahun 2018 penyediaan jasa pelayanan kebersihan kantor dapat terwujud pada Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Padang Pariaman.

e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan

Anggaran **Rp3.500.000,00** dan realisasi **Rp2.340.000,00** atau sebesar **66,86%**. Dari kegiatan ini dapat disediakan bacaan berupa surat kabar/koran harian lokal sebanyak 9 (sembilan) macam surat kabar lokal. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan pelaksanaannya tidak terealisasi sesuai dengan target disebabkan karena Pemindahan Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Padang Pariaman ke Gedung Bupati Padang Pariaman, dimana Bahan Bacaan disediakan oleh Bagian Humas Setdakab. Padang Pariaman.

f. Penyediaan Makanan dan Minuman

Anggaran **Rp10.500.000,00** dan realisasi **Rp10.191.500,00** atau sebesar **97,06%**. Penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu selama tahun 2018 dapat disediakan. Penyediaan makanan dan minuman rapat/tamu

pelaksanaannya sesuai dengan agenda rapat yang dilaksanakan dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

g. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Anggaran **Rp81.000.000,00** dan realisasi **Rp80.615.075,00** atau sebesar **99,52%**. Selama tahun anggaran 2018 Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Padang Pariaman mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah sesuai undangan serta *event* kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku.

h. Penyediaan Jasa Pendukung Perkantoran

Anggaran **Rp61.200.000,00** dan realisasi **Rp61.200.000,00** atau sebesar **100%**. Kegiatan Penyediaan Jasa Pengaman Kantor terlaksana sesuai target kinerja yang ditetapkan yaitu pembayaran honor Tenaga Swakelola/Tenaga Kerja Non Pegawai sebanyak 3 (tiga) orang.

Pencapaian kinerja keuangan atas Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dapat diuraikan lebih lanjut pada tabel dibawah ini :

TABEL 2.2.
REALISASI ANGGARAN
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

No.	Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan	
		Target	Realisasi	Satuan		(Rp)	(%)
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	Bulan	31,209,675.00	30,437,500.00	97.53
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	12	Bulan	3,060,325.00	3,060,325.00	100.00
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12	12	Bulan	56,000,000.00	54,840,000.00	97.93
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1	1	Tahun	21,600,000.00	21,600,000.00	100.00
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	1	Tahun	3,500,000.00	2,340,000.00	66.86
6	Penyediaan Makanan dan Minuman	12	12	Bulan	10,500,000.00	10,191,500.00	97.06
7	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	1	1	Tahun	81,000,000.00	80,615,075.00	99.52
8	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran	1	1	Tahun	61,200,000.00	61,200,000.00	100.00
Jumlah					268,070,000.00	264,284,400.00	98.59

2.1.1.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini terdiri atas 4 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar **Rp83.000.000,00**. Dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar **79.944.500,00** atau **96,32%**. Pada pelaksanaan program ini, seluruh indikator kinerja keluaran (*output*) kegiatan dapat mencapai target yang ditetapkan, hanya beberapa kegiatan yang tidak tercapai targetnya, dengan rincian masing-masing kegiatan sebagai berikut :

a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Anggaran **Rp8.000.000,00** dan realisasi **Rp8.000.000,00** atau sebesar **100,00%**. Telah tersedianya peralatan gedung kantor sebanyak 1 (satu) unit Infocus.

b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Anggaran **Rp15.000.000,00** dan realisasi **Rp14.947.500,00** atau sebesar **99,65%**. Telah dilaksanakan pemeliharaan terhadap gedung kantor sesuai dengan kebutuhan dan anggaran tersedia.

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Anggaran **Rp50.000.000,00** dan realisasi **Rp47.024.500,00** atau sebesar **94,05%**. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional SKPD menyediakan dana untuk belanja service kendaraan, penggantian suku cadang, BBM dan pelumas, STNK serta belanja perbaikan kendaraan. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan realisasi fisik 100% sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan selama satu tahun anggaran sedangkan realisasi keuangan sebesar **94.05%**, yang tidak terealisasi adalah merupakan efisiensi dalam penggunaan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan riil SKPD.

d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Anggaran **Rp10.000.000,00** dan realisasi **Rp9.972.500,00** atau sebesar **99,73%**. Telah dilaksanakan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor sesuai dengan kebutuhan dan anggaran tersedia.

Pencapaian kinerja keuangan atas Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dapat diuraikan lebih lanjut pada tabel dibawah ini :

TABEL 2.2.
REALISASI ANGGARAN
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

No.	Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan	
		Target	Realisasi	Satuan		(Rp)	(%)
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1	1	unit	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1	1	Tahun	15,000,000.00	14,947,500.00	99.65
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	1	1	Tahun	50,000,000.00	47,024,500.00	94.05
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	1	1	Tahun	10,000,000.00	9,972,500.00	99.73
Jumlah					83,000,000.00	79,944,500.00	96.32

2.1.1.3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini hanya terdiri atas 1 kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp20.000.000,00**. Dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar **Rp16.008.900,00** atau **80,04%** dengan sisa dana sebesar **Rp3.991.100,00** yang disebabkan karena efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran tahun 2018. Pada pelaksanaan program ini, indikator kinerja keluaran (*output*) kegiatan bersangkutan dapat mencapai target yang ditetapkan.

Pencapaian kinerja keuangan atas Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dapat diuraikan lebih lanjut pada tabel dibawah ini :

TABEL 2.3.
REALISASI ANGGARAN
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SDM

No.	Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan	
		Target	Realisasi	Satuan		(Rp)	(%)
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	1	1	tahun	20,000,000	16,008,900	80.04
J u m l a h					20,000,000	16,008,900	80.04

2.1.1.4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini hanya terdiri atas 1 kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp46.750.000,00**. Dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar **Rp41.024.127,00** atau **87,75%**, dengan sisa dana sebesar

Rp5.725.873,00 yang disebabkan karena efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran tahun 2018.

Pencapaian kinerja keuangan atas Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dapat diuraikan lebih lanjut pada tabel dibawah ini :

TABEL 2.4.
REALISASI ANGGARAN
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

No.	Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan	
		Target	Realisasi	Satuan		(Rp)	(%)
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	7	7	dokumen	46,750,000	41,024,127.00	87.75
Jumlah					46,750,000	41,024,127.00	87.75

2.1.1.5. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Program ini terdiri atas 2 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar **Rp346.990.000,00**. Dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar **Rp343.057.895,00** atau **98,87%** dengan sisa dana sebesar **Rp3.932.105,00** yang disebabkan karena efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran tahun 2018. Pada pelaksanaan program ini indikator kinerja keluaran (*output*) kegiatan dapat mencapai target yang ditetapkan.

Pencapaian kinerja keuangan atas Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan pada umumnya target kinerja dapat tercapai, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Operasional Komunitas Intelijen Daerah (Peningkatan Penanganan Kantrantibmas di Daerah)

Anggaran **Rp67.490.000,00** dan realisasi **Rp66.620.750,00** atau sebesar **98,71%** dengan sisa dana sebesar **Rp869.250,00**. Kegiatan ini telah terlaksana dengan realisasi output sesuai dengan target yaitu terpantaunya dan terkendalinya Keamanan dan ketertiban masyarakat di 17 (tujuh belas) Kecamatan dalam Kabupaten Padang Pariaman selama 1 (satu) tahun.

b. Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Daerah Tingkat Kabupaten

Anggaran **Rp279.500.000,00** dan realisasi **Rp276.437.145,00** atau sebesar **98,90%** dengan sisa dana sebesar **Rp3.062.855,00**. Maksud dan Tujuan kegiatan ini dilaksanakan adalah agar terpantau, tertangani dan tersedianya Laporan Gangguan Keamanan Dalam Negeri di daerah Kabupaten Padang Pariaman selama 1 (satu) tahun di 17 (tujuh belas) Kecamatan. Kegiatan ini telah terlaksana dengan realisasi output sesuai target yaitu tersedianya Dokumen Laporan Gangguan Keamanan Dalam Negeri di daerah Kabupaten Padang Pariaman per triwulan.

**TABEL 2.5.
REALISASI ANGGARAN
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN
KENYAMANAN LINGKUNGAN**

No.	Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan	
		Target	Realisasi	Satuan		(Rp)	(%)
1	Kegiatan Operasional Komunitas Intelijen Daerah (Peningkatan Penanganan Kantramtibmas di Daerah)	1	1	Tahun	67,490,000.00	66,620,750.00	98.71
2	Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Daerah Tingkat Kabupaten	1	1	Tahun	279,500,000.00	276,437,145.00	98.90
Jumlah					346,990,000.00	343,057,895.00	98.87

2.1.1.6. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Program ini terdiri atas 2 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar **Rp30.597.400,00**. Dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar **Rp30.597.400,00** atau **100%**. Pada pelaksanaan program ini indikator kinerja keluaran (*output*) kegiatan dapat mencapai target yang

ditetapkan. Kegiatan ini telah terlaksana dengan realisasi output sesuai target.

a. Kegiatan Pembinaan Wawasan Bangsa

Anggaran **Rp30.597.400,00** dan realisasi **Rp30.597.400,00** atau sebesar **100%**. Kegiatan ini telah terlaksana dengan realisasi output sesuai dengan target yaitu meningkatnya Wawasan Kebangsaan Generasi Muda Kabupaten Padang Pariaman tentang nilai – nilai luhur bangsa.

b. Kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan

Anggaran **Rp0,00** dan realisasi **Rp0,00** atau sebesar **00,00%**. Kegiatan ini tidak terlaksana karena adanya pengurangan dana pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018.

Pencapaian kinerja keuangan atas Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan dapat diuraikan lebih lanjut pada tabel dibawah ini:

**TABEL 2.5.
REALISASI ANGGARAN
PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN**

No.	Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan	
		Target	Realisasi	Satuan		(Rp)	(%)
1	Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	60	60	OK	30,597,400.00	30,597,400.00	100.00
2	Forum Pembauran Kebangsaan	0	0	OK	0.00	0.00	0.00
Jumlah					30,597,400.00	30,597,400	100.00

2.1.1.7. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

Program ini terdiri atas 3 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar **Rp83.868.200,00**. Dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar **Rp83.868.200,00** atau **100%** dengan sisa dana sebesar **Rp0,00**. Pada

pelaksanaan program ini indikator kinerja keluaran (*output*) kegiatan dapat mencapai target yang ditetapkan dengan realisasi keuangan sudah memenuhi efisiensi dan efektifitas, hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja sebesar **100%**, sementara target kinerja dapat tercapai. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba

Anggaran **Rp26.767.600,00** dan realisasi **Rp26.767.600,00** atau sebesar **100%**. Kegiatan ini telah terlaksana dengan realisasi output sesuai dengan target yaitu meningkatkan kesadaran Generasi Muda akan Bahaya Narkoba dan sejenisnya.

b. Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) di Kabupaten Padang Pariaman

Anggaran **Rp57.100.600,00** dan realisasi **Rp57.100.600,00** atau sebesar **100%** dengan sisa dana sebesar **Rp0,00**. Kegiatan ini telah terlaksana dengan realisasi output sesuai dengan target yaitu terlaksananya Kegiatan Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) di Kabupaten Padang Pariaman dengan Acara Lomba Gerak Jalan Jantung Sehat.

c. Kegiatan Operasional BNK

Anggaran **Rp0,00** dan realisasi **Rp0,00** atau sebesar **0,00%** dengan sisa dana sebesar **Rp0,00**. Kegiatan ini tidak terlaksana karena adanya pengurangan dana pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018.

Pencapaian kinerja keuangan atas Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) dapat diuraikan lebih lanjut pada tabel dibawah ini :

TABEL 2.6.
REALISASI ANGGARAN
PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT
MASYARAKAT (PEKAT)

No.	Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan	
		Target	Realisasi	Satuan		(Rp)	(%)
1	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	70	70	OK	26,767,600.00	26,767,600.00	100.00
2	Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) di Kab. Padang Pariaman	17	17	Kec	57,100,600.00	57,100,600.00	100.00
3	Kegiatan Operasional BNK	0	0	Sekolah	0.00	0.00	0.00
J u m l a h					83,868,200.00	83,868,200.00	100.00

2.1.1.8. Program Pendidikan Politik Masyarakat

Program ini terdiri atas 5 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar **Rp156.397.900,00**. Dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar **Rp151.954.200,00** atau **97,17%**. Pada pelaksanaan program ini, indikator kinerja keluaran (*output*) kegiatan bersangkutan dapat mencapai target yang ditetapkan. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut :

a. Sosialisasi Politik Bagi Pemilih Pemula

Anggaran **Rp28.726.500,00** dan realisasi **Rp28.726.500,00** atau sebesar **100%**. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu khususnya untuk pemilih pemula yang sebelumnya belum menggunakan hak pilihnya.

b. Pembinaan dan Pengawasan Bantuan Dana Partai Politik

Anggaran **Rp18.000.000,00** dan realisasi **Rp16.326.800,00** atau sebesar **90,70%** dengan sisa dana sebesar **Rp1.673.200,00**. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah agar terlaksananya Verifikasi terhadap Bantuan Dana Hibah yang diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Padang Pariaman. Kegiatan ini telah terlaksana dengan realisasi output sesuai target yang telah

ditetapkan yaitu terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Bantuan Dana Partai Politik.

c. Pembekalan Pengajuan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik

Anggaran **Rp60.675.000,00** dan realisasi **Rp58.565.800,00** atau sebesar **96,52%** dengan sisa dana sebesar **Rp2.109.200,00**. Kegiatan ini telah terlaksana dengan realisasi output sesuai target yang telah ditetapkan yaitu Meningkatkan pengetahuan dan wawasan pimpinan parpol dan aparatur dalam proses pengajuan dan pertanggungjawaban.

d. Updating dan Komputerisasi Data Ormas, Monitoring dan Evaluasi Ormas dan LSM

Anggaran **Rp11.100.000,00** dan realisasi **Rp10.456.700,00** atau sebesar **94,20%** dengan sisa dana sebesar **Rp643.300,00**. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah agar terdatanya, terpantaunya Ormas dan LSM yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Kegiatan ini telah terlaksana dengan realisasi output sesuai target yang telah ditetapkan yaitu terlaksananya pendataan dan pemantauan terhadap ormas dan LSM.

e. Dialog Politik Bersama Pimpinan partai Poitik dan Tokoh Masyarakat

Anggaran **Rp37.878.400.000,00** dan realisasi **Rp37.878.400,00** atau sebesar **100%** dengan sisa dana sebesar **Rp0,00**. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terjalinnya komunikasi antara pimpinan partai politik dan tokoh masyarakat. Kegiatan ini telah terlaksana dengan realisasi output sesuai target yang telah ditetapkan yaitu terlaksananya Dialog Politik bersama Pimpinan dan Tokoh Masyarakat.

Pencapaian kinerja keuangan atas Program Pendidikan Politik Masyarakat dapat diuraikan lebih lanjut pada tabel dibawah ini :

TABEL 2.7.
REALISASI ANGGARAN
PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT

No.	Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan	
		Target	Realisasi	Satuan		(Rp)	(%)
1	Sosialisasi Politik bagi Pemilih Pemula	105	105	orang	28,726,500.00	28,726,500.00	100.00
2	Pembinaan dan Pengawasan Bantuan Dana Partai Politik	11	11	orang	18,000,000.00	16,326,800.00	90.70
3	Pembekalan Pengajuan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik	33	33	OK	60,675,000.00	58,565,800.00	96.52
4	Updating dan Komputerisasi Data Ormas, Monitoring dan Evaluasi Ormas dan LSM	17	17	Kecamatan	11,100,000.00	10,456,700.00	94.20
5	Dialog Politik Bersama Pimpinan Partai Politik dan Tokoh Masyarakat	84	84	Orang	37,878,400.00	37,878,400.00	100.00
Jumlah					156,379,900	151,954,200	97.17

2.1.2. Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kesbangpol Tahun 2018

Untuk melihat Review dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun 2018 dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kantor Kesbangpol dan realisasi APBD dapat kita lihat secara lebih terperinci dalam matriks terlampir.

TABEL 2.17.
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BAPELITBANGDA DAN
PENCAPAIAN RENSTRA KESBANGPOL S/D TAHUN 2018
KABUPATEN PADANG PADANG PARIAMAN RIAMAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2018	Realisasi Renja SKPD 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.03.1.03.02.01.	I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran						100	100	100
1.03.1.03.02.01.01	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya ATK, Materai, penggandaan dan cetak dokumen juknis kerja	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100
1.03.1.03.02.01.07	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening listrik, Air, telepon & Faksimile	12 Kali / Tahun	12 Kali / Tahun	12 Kali / Tahun	12 Kali / Tahun	0	12 Kali / Tahun	12 Kali / Tahun	100
1.03.1.03.02.01.08	3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran honorarium Satuan pengelola keuangan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100
1.03.1.03.02.01.15	4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya bahan kebersihan dan jasa petugas kebersihan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
1.03.1.03.02.01.17	5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan untuk 1 tahun.	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	100	4 paket	4 paket	100
1.03.1.03.02.01.18	6 Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minum rapat dan tamu	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
						Target Renja SKPD tahun 2018	Realisasi Renja SKPD 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.03.1.03.02.01.19	7	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terikutinya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100
	8	Penyediaan Jasa Pendukung Perkantoran	Pembayaran gaji tenaga swakelola sebanyak 4 orang								
1.03.1.03.02.02.	II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Perentase Sarana dan Prasarana yang terpenuhi								
1.03.1.03.02.02.09	9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Persentase Sarana dan Prasarana yang terpenuhi	0	0	1 unit	1 unit	100	0	0	0
1.03.1.03.02.02.10	10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor (1 unit komputer dan 1 unit Laptop)	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100
1.03.1.03.02.01.24	11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya mebeleur kantor	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100			
1.03.1.03.02.01.26	12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100			
1.03.1.03.02.05.	III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase Ketersediaan Rencana Kerja SKPD								

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
						Target Renja SKPD tahun 2018	Realisasi Renja SKPD 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.03.1.03.02.05.03	13	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Aparatur yang mengikuti bintek implementasi peraturan perundang-undangan	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100			
1.03.1.03.02.06.	IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Tepat Waktu								
			Tersusunnya dok TAPKIN, RKA, DPA, RKA-P, DPA-P, RENJA, LAKIP, LPPD dan laporan keuangan								
1.03.1.03.02.06.01	14	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Laporan Tepat Waktu	10 dokumen	10 Dokumen	10 dokumen	10 dokumen	100	10 dokumen	10 dokumen	100
1.03.1.03.02.34.	V	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan								
1.03.1.03.02.34.08	15	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Pembekalan FKDM	Terlaksananya rapat koordinasi FKDM dan Pembekalan FKDM	0	0	100 Orang	100 Orang	100	0	0	0
			Meningkatnya Pengetahuan dan Wawasan FKDM se								

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
						Target Renja SKPD tahun 2018	Realisasi Renja SKPD 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
			Kabupaten Padang Pariaman								
1.03.1.03.02.34.09	16	Kegiatan Operasional Komunitas Intelijen Daerah (Peningkatan Penanganan Kantrantibmas di Daerah)	1. Pelaksanaan operasional kegiatan kominda dalam pengendalian kantrantibmas	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	0	0	0
			2. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama unit intelijen dalam mengatasi masalah kantrantibmas								
1.03.1.03.02.34.10	17	Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Daerah Tingkat Kabupaten	Terlaksananya operasional dan koordinasi tim penanganan konflik sosial di Kabupaten Padang Pariaman	1 Tahun/Dokumen	1 Tahun/Dokumen	1 Tahun/Dokumen	1 Tahun/Dokumen	1 Tahun/Dokumen	1 Tahun/Dokumen	1 Tahun/Dokumen	1 Tahun/Dokumen
			Terpantaunya dan tertanganinya konflik sosial di Kabupaten Padang Pariaman								
1.03.1.03.02.36.	VI	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Meningkatnya wawasan kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara								
1.03.1.03.02.36	18	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai	Generasi muda yang mengikuti sosialisasi	100 Orang/ta	100 Orang/tahu	100 Orang/ta	100 Orang/ta	100 Orang/ta	0	0	100

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2018	Realisasi Renja SKPD 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	luluh budaya bangsa	pewarisan nilai-nilai luhur bangsa	hun	n	hun	hun	hun			
		Meningkatnya wawasan generasi muda tentang nilai-nilai luhur bangsa								
1.03.1.03.02.36.04	19 Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Aparatur Ormas/LSM, Guru dan Generasi yang mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan	100 orang/Tahun	100 orang/Tahun	100 orang/Tahun	100 orang/Tahun	100 orang/Tahun	70 Orang/tahun	70 orang/tahun	100
		Meningkatnya wawasan Aparatur Ormas/LSM, Guru dan Generasi dalam rangka pembinaan wawasan kebangsaan								
1.03.1.03.02.36.08	20 Forum Pembauran Kebangsaan	Terlaksananya Forum Pembauran Kebangsaan	0	0	1 Tahun/I Tim	1 Tahun/I Tim	1 Tahun/I Tim	1 Tahun/I Tim	1 Tahun/I Tim	1 Tahun/I Tim
		Meningkatnya rasa toleransi antar suku bangsa								
1.03.1.03.02.39.	VI I Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Meningkatnya pemberantasan penyalahgunaan Napza, Miras, dan penyakit masyarakat (Pekati) lainnya								

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
						Target Renja SKPD tahun 2018	Realisasi Renja SKPD 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.03.1.03.02.39.01	21	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Terlaksananya Penyuluhan pencegahan peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	100
			Meningkatnya kesadaran generasi muda akan bahaya Narkoba dan sejenisnya.								
1.03.1.03.02.39.09	22	Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) di Kabupaten Padang Pariaman	Terlaksananya Peringatan HANI di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017	1 Kali/Tahun	1 Kali/Tahun	1 Kali/Tahun	1 Kali/Tahun	1 Kali/Tahun	1 Kali/Tahun	1 Kali/Tahun	1 Kali/Tahun
			Meningkatnya kesadaran masyarakat akan bahaya Narkoba dan sejenisnya.								
1.03.1.03.02.39.10	23	Operasional BNK	- Razia BNK sekaligus Penyuluhan Anti Narkoba	3 Kali/Tahun	3 Kali/Tahun	3 Kali/Tahun	3 Kali/Tahun	3 Kali/Tahun	3 Kali/Tahun	3 Kali/Tahun	3 Kali/Tahun
			- Tes Urine Bagi Pejabat Eselon II, III.a dan Anggota DPRD Kab. Padang Pariaman						126 Orang/Tahun	126 orang /tahun	
1.03.1.03.02.40.	VI II	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Terwujudnya sistem dan budaya politik yang demokratis serta mantapnya hubungan								

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2018	Realisasi Renja SKPD 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		supra dan infra struktur politik di daerah								
1.03.1.03.02.40.10	24	Pembinaan dan Pengawasan Bantuan dana Partai Politik	11 parpol/tahun	11 parpol/tahun	11 parpol/tahun	11 parpol/tahun	11 parpol/tahun	11 parpol/tahun	11 parpol/tahun	100
		Terealisasinya bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD								
1.03.1.03.02.40.10	25	Pembekalan Pengajuan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol	33 Orang	0	33 Orang	33 Orang	100	33 Orang	33 Orang	100
		Meningkatnya pengetahuan dan wawasan pimpinan parpol dan aparatur dalam proses pengajuan dan								100
1.03.1.03.02.40.10	26	Updating dan Komputerisasi Data Ormas, Monitoring dan Evaluasi Ormas/LSM	1 Paket/Dokumen	1 Paket/Dokumen	1 Paket/Dokumen	1 Paket/Dokumen	1 Paket/Dokumen	1 Paket/Dokumen	1 Paket/Dokumen	100
		1. Tersedianya data Ormas/LSM sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan								
		2. Terpantaunya aktifitas								

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
						Target Renja SKPD tahun 2018	Realisasi Renja SKPD 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
			Ormas/LSM di Kabupaten Padang Pariaman								
1.03.1.03.02.40.10	27	Dialog Politik Bersama Pimpinan Partai Politik dan Tokoh Masyarakat.	Terlaksananya Dialog Politik Bersama Pimpinan Parpol dan Tomas	84 orang/tahun	84 orang/tahun	84 orang/tahun	84 orang/tahun	84 orang/tahun	150 orang/tahun	150 orang/tahun	100
			Terjalannya komunikasi antara pimpinan partai politik dan tokoh masyarakat								
1.03.1.03.02.40.10	28	Sosialisasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013	Terlaksananya Sosialisasi UU Nomor 17 Tahun 2013 di Kabupaten Padang Pariaman	60 Orang/Tahun	60 Orang/Tahun	60 Orang/Tahun	60 Orang/Tahun	60 Orang/Tahun	0	0	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten. Meskipun sejumlah kebijakan telah dikeluarkan untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan daerah seperti yang tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dikenal dengan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Meskipun sistem Musrenbang telah dikembangkan lebih baik dalam rangka menerpadukan perencanaan pembangunan namun belum lagi optimal.

Melihat kondisi tersebut Kesbangpol Kabupaten Padang Pariaman selaku Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah sebagai lembaga teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri mencoba untuk mensinergikan perencanaan pembangunan melalui :

- a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah pusat maupun daerah.
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Adapun Capaian Kinerja Pelayanan Kantor Kesbang dan Politik sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kantor Kesbang dan Politik dapat kita lihat sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kantor KESBANGPOL
Kabupaten Padang Pariaman**

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2015	Tahun 2015	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2019	Tahun 2020	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
1	Terwujudnya penyelenggaraan sistem politik dan pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan serta terciptanya pemilu yang berkualitas	Kegiatan pembinaan politik daerah		2 Keg	4 Keg	5 Keg	2 Keg	4 Keg	4 Keg	4 Keg	4 Keg	
				13	13	13	13	13	13	13	11	
2	Meningkatkan stabilitas daerah yang mantap dan terkendali dalam rangka menjaga keutuhan bangsa dan negara dalam kerangka NKRI	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP		0 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	
				0 Keg	142	145	145	142	142	142	142	

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman merupakan unsur pemerintah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyelenggara unsur pemerintahan daerah dalam urusan wajib yang di pimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa, dan Politik. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis dibidang urusan kesatuan bangsa dan politik;
- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang urusan kesatuan bangsa dan politik;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

Sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mendukung pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dibidang urusan kesatuan bangsa dan politik mempunyai tugas yang sangat strategis antara lain, Perumusan kebijakan

teknis dibidang urusan kesatuan bangsa dan politik, Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang urusan kesatuan bangsa dan politik, Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik, Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dengan uraian tugas sebagai berikut :

1. KEPALA KANTOR KESBANG DAN POLITIK

RINGKASAN TUGAS :

Merumuskan program kerja dan petunjuk kerja, mengkoordinasikan, membina dan mengarahkan kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik menetapkan program kerja kantor dan mengendalikan pelaksanaannya, memantau serta mengevaluasi perkembangan kegiatan serta merumuskan kebijakan teknis di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.

RINCIAN TUGAS :

1. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kantor.
2. Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis kantor sesuai dengan kebijakan umum pemerintah daerah.
3. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang kepegawaian daerah.
4. Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan kepegawaian daerah.
5. Menyelenggarakan fasilitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, kesekretariatan, fungsi dan pengadaan, mutasi kepegawaian, data dan pengembangan pegawai, disiplin dan pembenahan.
6. Menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelanjutan pelaksanaan kegiatan kantor.
7. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan rencana strategis, LAKIP, LKPD dan LPPD Kantor serta pelaksanaan tugas-tugas teknis, evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, perencanaan dan pengembangan diklat pimpinan diklat teknis.
8. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis kepegawaian daerah.
9. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

10. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

2. KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

RINGKASAN TUGAS :

Menyiapkan Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan dibidang program, keuangan, umum dan kepegawaian.

Kepala Tata Usaha mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Padang Pariaman.
2. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan.
3. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.

URAIAN TUGAS :

1. Menyelenggarakan pengkajian serta koordinasi perencanaan dan program kantor.
2. Menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan.
3. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan.
4. Menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja.
5. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
6. Menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan kantor.
7. Menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
8. Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protocol dan hubungan masyarakat.
9. Menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan.
10. Menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional.

11. Menyelenggarakan pengkajian bahan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD kantor.
12. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
13. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

3. KEPALA SEKSI KESATUAN BANGSA

RINGKASAN TUGAS

Menyusun rencana, membagi tugas, mengkoordinasikan, mengendalikan, menilai dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan, serta menyiapkan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan program kerja dan kegiatan Seksi Kesatuan Bangsa berdasarkan peraturan dan ketentuan.

RINCIAN TUGAS :

1. URUSAN BIDANG BINA IDEOLOGI

- a. Melaksanakan program kerja bina ideologi.
- b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis bina ideologi.
- c. Melaksanakan Penyusunan bahan fasilitas penyelenggaraan bina ideologi.
- d. Melaksanakan pengelolaan data bina ideologi.
- e. Melaksanakan bahan koordinasi bina ideologi.
- f. Melaksanakan penyusunan Telaahan Staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
- g. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi.

2. URUSAN BINA WAWASAN KEBANGSAAN

- a. Melaksanakan program kerja Bina Wawasan Kebangsaan.
- b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Bina Wawasan Kebangsaan.
- c. Melaksanakan Penyusunan bahan fasilitas penyelenggaraan Bina Wawasan Kebangsaan.
- d. Melaksanakan pengelolaan data Bina Wawasan Kebangsaan.
- e. Melaksanakan bahan koordinasi Bina Wawasan Kebangsaan.

- f. Melaksanakan penyusunan Telaahan Staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
- g. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi.

3. URUSAN KEWASPADAAN

- a. Melaksanakan pengkajian program kerja bina Kewaspadaan.
- b. Melaksanakan pengkajian bahan kebijakan teknis bina Kewaspadaan.
- c. Melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi kewaspadaan.
- d. Melaksanakan fasilitasi kewaspadaan.
- e. Melaksanakan koordinasi kewaspadaan.
- f. Melaksanakan fasilitasi dan pengembangan kewaspadaan.
- g. Melaksanakan penyusunan Telaahan Staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
- h. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi koordinasi kewaspadaan.
- i. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota.
- j. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
- k. Menyimpan dan memelihara berkas kerja, data dan dokumen menurut ketentuan.
- l. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. KEPALA SEKSI PEMBINAAN POLITIK

RINGKASAN TUGAS :

Menyusun rencana, membagi tugas, mengkoordinasikan, mengendalikan, menilai dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan Seksi Pembinaan Politik, serta menyiapkan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan program kerja dan kegiatan Seksi Pembinaan Politik berdasarkan peraturan dan ketentuan.

RINCIAN TUGAS :

1. Melaksanakan penyusunan program kerja pembinaan politik.
2. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pembinaan politik.
3. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan politik.
4. Melaksanakan pengelolaan data fasilitasi parpol pembinaan politik.
5. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha fasilitas parpol.
6. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi fasilitasi parpol.
7. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan bidang pembinaan politik.
8. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan pembinaan politik.
9. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan petunjuk dan arahan dalam ruang lingkup kedinasan.

5. KEPALA SEKSI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

RINGKASAN TUGAS :

Menyusun rencana, membagi tugas, mengkoordinasikan, mengendalikan, menilai dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan Seksi Hubungan Antar Lembaga, menyiapkan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan program kerja dan kegiatan di bidang hubungan antar lembaga sesuai dengan peraturan dan ketentuan.

RINCIAN TUGAS :

1. Melaksanakan penyusunan program kerja Hubungan Antar Lembaga dan Ormas.
2. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitasi Hubungan Antar Lembaga dan Ormas.
3. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi Hubungan Antar Lembaga dan Ormas.
4. Melaksanakan pengelolaan data fasilitasi Hubungan Antar Lembaga dan Ormas.
5. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha fasilitas Hubungan Antar Lembaga dan Ormas.
6. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi fasilitasi Hubungan Antar Lembaga dan Ormas.

7. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Hubungan Antar Lembaga dan Ormas.
8. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Hubungan Antar Lembaga dan Ormas.
9. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan petunjuk dan arahan dalam ruang lingkup kedinasan.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman, hampir sama dengan SKPD lainnya yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, dimana terdapat beragam komposisi pegawai baik dari tingkat pendidikan formal, pangkat/golongan ruang, eselonering maupun jenjang pelatihan penjenjangan lainnya.

TABEL 2.2
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI
BERDASARKAN GOLONGAN RUANG

No	Golongan	Jumlah
1	IV	2
2	III	5
3	II	3
4	I	1
	Jumlah	11 Orang

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Kesbangpol April Tahun 2017

Komposisi pejabat eselonering di Lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman adalah sesuai dengan tabel berikut dan seluruh jabatan sudah diisi oleh pejabat struktural berdasarkan surat keputusan pelantikan masing-masing.

TABEL 2.3
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI
BERDASARKAN ESSELONERING

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon III	1
2	Eselon IV	4
	Jumlah	5 orang

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Kesbangpol Tahun 2017

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesbangpol menghadapi permasalahan dan hambatan antara lain :

1. Masih kurangnya sumberdaya Manusia baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan Kantor Kesbangpol.
2. Jumlah pegawai Kantor Kesbangpol yang telah memiliki Sertifikat pengadaan barang/jasa masih sedikit.
3. Adanya keterlambatan regulasi baik ditingkat pusat maupun propinsi dan Kabupaten, sehingga dalam penyusunan dokumen pelaksana anggaran (DPA) SKPD yang sudah ditetapkan harus dirubah dalam proses perubahan anggaran untuk menyesuaikan dengan regulasi yang terbaru.
4. Belum optimalnya dokumen perencanaan dari personil yang bertanggungjawab melaksanakan tugas dibidang perencanaan sebelumnya.
5. Kondisi Sarana dan Prasarana yang kurang memandai dan telah banyaknya yang rusak tidak dapat mencapai hasil yang di harapkan ini disebabkan sebagian dari Sarana dan Prasarana sangat kurang dan kondisi yang rusak dan untuk mengoperasionalkan membutuhkan dana yang besar.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan perencanaan yang disusun apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja SKPD (RENJA SKPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dokumen perencanaan sebagaimana disebutkan diatas khususnya rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 disusun dengan mepedomani 1). RPJPN tahun 2005 – 2025, 2). RPJMN 2017-2020, 3) RPJPD Propinsi Sumbar 2005 – 2025, 4). RPJPD Kabupaten Padang Pariaman 2005 – 2025, 5). RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 -2021, 6). Renstra Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Paddag Pariaman Tahun 2016 – 2021. Hal ini untuk menjaga konsistensi dokumen perencanaan mulai dari RPJPD sampai dengan Renja SKPD yang dilaksanakan masing-masing SKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (hasil Musrenbang)

Rencana kerja (Renja) Kantor Kesbangpol tahun 2020 merupakan rencana kerja akan disusun untuk dituangkan dalam Rencana Strategis Kantor Kesbangpol (Renstra Kesbangpol) tahun 2016 – 2021, Renja Kantor Kesbangpol disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata cara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah Padang Pariaman dengan memperhatikan pada Rencana Kerja pembangunan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020 ditetapkan tolak ukur kinerja melalui indicator makro. Indicator ekonomi dan social.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang merupakan sinergitas perencanaan mulai dari tingkat nagari, kecamatan dan SKPD, maka tahun 2020 pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tidak ada usulan skala prioritas dari hasil musrenbang. Adapun program dan kegiatan yang dituangkan dalam rencana tahun 2020 berdasarkan target kinerja yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran SKPD.

BAB III**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN****3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

Berdasarkan potensi dan keunggulan Wilayah Sumatera, sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2017 – 2020, maka tema besar Pembangunan Wilayah Sumatera sebagai:

8-4Salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional.

1. Lumbung energi nasional termasuk pengembangan energy terbarukan biomas.
2. Pengembangan hilirisasi komoditas batu bara
3. Industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, timah, bauksit, dan kaolin.
4. Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan, pariwisata bahari, industri perkebunan, dan industri pertambangan.

Tujuan pengembangan Wilayah Sumatera tahun 2017-2020 adalah mendorong percepatan dan perluasan pembangunan Wilayah Sumatera dengan menekankan keunggulan dan potensi daerah, melalui: (a) pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, serta pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, timah, bauksit, dan kaolin; (b) penyediaan infrastruktur wilayah; (c) peningkatan SDM dan ilmu dan teknologi secara terus menerus.

Dalam penyusunan Renja Kantor Kesbang dan Politik Tahun 2020 telah mengacu pada kebijakan dari Pemerintah atasan, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Adapun kegiatan dalam renja Kantor Kesbangpol Tahun 2020 apabila disandingkan dengan kebijakan pusat dan provinsi diuraikan pada Tabel 3.1. sebagai berikut :

Tabel 3.1.

Matrik Keterkaitan Antara RPJPN, RPJPD Propinsi Sumatera Barat dan RPJPD Padang Pariaman Tahun 2005-2025

Visi Misi RPJPN Tahun 2005-2025		Visi Misi RPJPD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025		Visi Misi RPJPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025	
<i>Indonesia Yang Mandiri, Maju, adil dan Makmur</i>		<i>Menjadi Provinsi Terkemuka Berbasis Sumberdaya Manusia Yang Agamais Pada Tahun 2025</i>		<i>Padang Pariaman Tahun 2025 Unggul dibidang Agribisnis dan Perdagangan Berdasarkan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas</i>	
1	Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila	1	Mewujudkan kehidupan agama dan budaya berdasarkan filosofi " <i>Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah</i> ,"	1	Mewujudkan system agribisnis dan agroindustri yang tangguh berbasiskan nagari, ditunjang oleh system teknologi dan informasi mutakhir, dalam rangka pengembangan ekonomi kawasan
2	Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing	2	Mewujudkan sistem hukum dan tata-pemerintahan yang baik,	2	Mewujudkan sistim perdagangan yang tangguh berorientasi ekspor
3	Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum	3	Mewujudkan sumberdaya insani yang berkualitas, amanah dan berdaya saing tinggi,	3	Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, dan berdaya saing tinggi
4	Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu	4	Mewujudkan usaha ekonomi produktif dan mampu bersaing di dunia global,	4	Mewujudkan Kehidupan Beragama Yang Baik dan Berkualitas, berlandaskan " <i>adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah</i> "

5	Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan	5	Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang baik dengan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan.	5	Mewujudkan tata pemerintahan yang jujur dan bertanggung jawab
6	Mewujudkan Indonesia asri dan lestari			6	Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan
7	Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional				
8	Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional				

Tabel 3.2. Matrik Keterkaitan Antara Visi dan Misi RPJMN 2017-2020 dengan Visi MISI Padang Pariaman Tahun 2017-2020

VISI RPJMN TAHUN 2017-2020		Visi Misi RPJPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025	
<i>Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong</i>		<i>Padang Pariaman Tahun 2025 Unggul dibidang Agribisnis dan Perdagangan Berdasarkan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas</i>	
	MISI RPJMN TAHUN 2015-2020		MISI RPJPD TAHUN 2005-2025
1	Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.	1	Mewujudkan system agribisnis dan agroindustri yang tangguh berbasiskan nagari, ditunjang oleh system teknologi dan informasi mutakhir, dalam rangka pengembangan ekonomi kawasan
2	Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.	2	Mewujudkan sistim perdagangan yang tangguh berorientasi ekspor
3	Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.	3	Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, dan berdaya saing tinggi
4	Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.	4	Mewujudkan Kehidupan Beragama Yang Baik dan Berkualitas, berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah"
5	Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.	5	Mewujudkan tata pemerintahan yang jujur dan bertanggung jawab
6	Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.	6	Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan
7	Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.		

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Rencana Kerja (Renja) Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 tidak lepas dari pencapaian visi Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman 2010-2017 yakni :

Terwujudnya Kesadaran Dan Partisipasi Masyarakat Yang Berwawasan Kebangsaan, Demokratis Menuju Kabupaten Padang yang Aman dan Harmonis”

Sedangkan untuk penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahun 2020 karena tahun 2020 merupakan tahun pertama dari periode kedua pelaksanaan RPJMD (Tahun 2017-2021) sesuai dengan pentahapan dalam RPJPD Tahun 2005-2025, jadi untuk menyusun perencanaan kita mengacu pada Pepres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2020. Untuk itu sejalan dengan itu sebagaimana yang dituangkan dalam Rancangan RKPD Tahun 2020 maka prioritas pembangunan adalah:

Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan Berbudaya
Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan Dan Perikanan
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Pengembangan Potensi Pariwisata Unggulan
Pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan dan berbasis Tata Ruang
Peningkatan kontribusi sektor industri dan perdagangan terhadap perekonomian daerah
Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran
Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah
Pengurangan Resiko bencana, kesiapsiagaan tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi maka untuk menyusun perencanaan dalam Renja Kantor Kesbang dan Politik tahun 2020 sesuai dengan prioritas yang ke tiga yaitu *Penerapan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan* maka tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kantor Kesbang dan Politik Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA (THN)				
				2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	7	9	11	13	14
1	Meningkatkan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat tentang Hak	Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum	Persentase jumlah partisipasi masyarakat dalam Pemilu	0%	0%	0%	75%	78%

	dan Tanggung Jawab Kehidupan Berpolitik yang harmonis, dinamis dan demokratis	Meningkatnya pembinaan ormas/LSM/kelompok masyarakat Meningkatnya kesadaran Parpol atas tata kelola keuangan dan administrasi	Persentase ormas/kelompok yang terdaftar dan aktif Persentase Laporan pertanggungjawaban Parpol tepat waktu	55% 11 partai politik	60% 11 partai politik	60% 11 partai politik	60% 13 partai politik	60% 13 partai politik
2	Meningkatkan kewaspadaan masyarakat dalam deteksi dini dan cegah dini terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	Meningkatnya keamanan & ketertiban masyarakat	Persentase jumlah potensi konflik sosial yang dapat dicegah	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba dan Miras	Menurunnya kasus narkoba ditengah masyarakat	Jumlah kasus Narkoba di tengah masyarakat.	54	36	33	30	25
4	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam masyarakat yang plural	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap ideologi serta ketahanan bangsa.	Persentase gangguan keamanan yang dapat diredam	100%	100%	100%	100%	100%

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
Mewujudkan Pemahaman, Kesadaran dan Fasilitasi Kehidupan Berpolitik.	Meningkatkan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat tentang Hak dan Tanggung Jawab Kehidupan Berpolitik yang harmonis, dinamis dan demokratis	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung pelaksanaan Pemilu yang aman, langsung, umum, bebas dan rahasia 1. Peningkatan koordinasi dan komunikasi antara pusat dan daerah 2. Peningkatan peran dan Pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan & kehidupan politik serta perluasan system informasi politik 3. Mendorong tumbuh kembangnya nilai-nilai demokratis pada warga masyarakat 4. Peningkatan peran & kapasitas pengurus parpol dalam sistem politik
		Meningkatnya pembinaan ormas/LSM/kelempok masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memasyarakatkan pemahaman dan pengamalan prinsip-prinsip HAM beserta peraturan perundangannya kepada masyarakat 2. Peningkatan pembinaan dan fasilitasi terhadap ormas / LSM 3. Peningkatan peran & kapasitas pengurus ormas sebagai mitra pemerintah

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
		Meningkatnya kesadaran Parpol atas tata kelola keuangan dan administrasi	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan Pembinaan kepada partai politik tentang tata kelola keuangan Melakukan bimbingan Teknis Pengajuan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik. Memberikan pemahaman kepada pengurus partai politik tentang aturan dan perundangan untuk tata kelola keuangan dan pencairan bantuan. Memberikan arahan kepada partai politik untuk mematuhi aturan yang berlaku
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Upaya Pencegahan terhadap Gangguan yang Timbul di Masyarakat.	Meningkatkan kewaspadaan masyarakat dalam deteksi dini dan cegah dini terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan koordinasi antar unsur penyelenggara kamtibmas Meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam deteksi dini dan cegah dini terhadap gangguan kamtibmas Meningkatkan kemampuan Dan ketrampilan aparat intelijen
Meningkatkan Partisipasi serta	Meningkatkan peran aktif	Menurunnya kasus Narkoba	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan koordinasi antar

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkoba	masyarakat dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba dan Miras	ditengah masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> 1. unsur pemberantas narkoba 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam deteksi dini dan cegah dini penyalahgunaan narkoba 3. Meningkatkan kualitas penyuluhan tentang bahaya narkoba 4. Tindak lanjut hasil pelaksanaan test urine
Mewujudkan yang memiliki pemahaman tentang nilai – nilai Wawasan Kebangsaan.	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam masyarakat yang plural	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap ideologi serta ketahanan bangsa.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pemahaman tentang wawasan kebangsaan kepada masyarakat 2. Menggali & memantapkan kembali rasa Cinta tanah air & bangsa, kesadaran bela negara, seni & budaya dalam kehidupan masyarakat 3. Menyertakan elemen Masyarakat dalam pembinaan / seminar / sosialisasi tentang wawasan kebangsaan & bela negara

3.3 Program dan Kegiatan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan, disamping melaksanakan program dan kegiatan rutin SKPD, pada tahun 2020 Kantor Kesbang dan Politik menyelenggarakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar, yang secara keseluruhan meliputi 8 program dan 30 kegiatan dengan total anggaran untuk tahun 2020 sebesar Rp 3.008.200.000,-

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 disusun sebagai upaya untuk mendukung pemerintah daerah dalam mencapai visi dan misi daerah, Secara umum, program dan kegiatan Kantor Kesbang dan Politik Tahun 2020 adalah sebagaimana Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 matriks berikut ini :

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		KET
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Renja 2020	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	BELANJA				1,376,800,000				2,381,200,000	
	BELANJA TIDAK LANGSUNG				997,955,028				997,955,028	
	BELANJA LANGSUNG				1,376,800,000				2,381,200,000	
1.03.1.03.02.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kesbangpol	100%	312,800,000			100%	308,200,000	
1.03.1.03.02.01.01	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Tersedianya ATK, Materai, penggandaan dan cetak dokumen juknis kerja	Kesbangpol	1 Tahun	41,000,000	DAU		1 Tahun	50,000,000	
1.03.1.03.02.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran honorarium Satuan pengelola keuangan	Kesbangpol	1 tahun	65,000,000	DAU		1 tahun	65,000,000	
1.03.1.03.02.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya bahan kebersihan dan jasa petugas kebersihan	Kesbangpol	1 tahun	30,000,000	DAU		1 tahun	30,000,000	
1.03.1.03.02.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan untuk 1 tahun.	Kesbangpol	1 tahun	12,000,000	DAU		1 tahun	12,000,000	
1.03.1.03.02.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minum rapat dan tamu	Kesbangpol	1 tahun	12,000,000	DAU		1 tahun	15,000,000	

1.03.1.03.02.01.18	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terikutinya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Kesbangpol	1 tahun	70,000,000			1 tahun	75,000,000	
1.03.1.03.02.01.19	Penyediaan jasa pendukung perkantoran	Pembayaran gaji tenaga swakelola sebanyak 3 orang	Kesbangpol	12 bulan	82,800,000	DAU		12 bulan	61,200,000	
1.03.1.03.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang terpenuhi	Kesbangpol	100%	170,000,000	DAU		100%	578,000,000	
1.03.1.03.02.02	Pengadaan kendaraan dinas operasional	Tersedianya kendaraan dinas/ operasional	Kesbangpol	1 Unit	-	DAU		1 Unit	400,000,000	
1.03.1.03.02.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor (2 unit komputer dan 2 unit printer)	Kesbangpol	1 tahun	28,000,000			1 tahun	30,000,000	
1.03.1.03.02.02.10	Pengadaan mobiler	Tersedianya mebeleur kantor	Kesbangpol	1 paket	20,000,000	DAU		1 paket	20,000,000	
1.03.1.03.02.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kesbangpol	1 tahun	20,000,000	DAU		1 tahun	20,000,000	
1.03.1.03.02.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kesbangpol	1 tahun	84,000,000	DAU		1 tahun	90,000,000	
1.03.1.03.02.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kesbangpol	1 tahun	18,000,000	DAU		1 tahun	18,000,000	
1.03.1.03.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Ketersediaan Rencana Kerja SKPD	Kesbangpol	100%	30,000,000	DAU		100%	30,000,000	

1.03.1.03.02.05.00	Pengadaan Pakaian Dinas Hari-Hari Tertentu	Peningkatan disiplin aparaturn sipil negara	Kesbangpol	18 orang	-	DAU	-	-	-
1.03.1.03.02.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Aparatur yang mengikuti bintek implementasi peraturan perundang-undangan	Kesbangpol	11 orang	30,000,000	DAU	11 orang	30,000,000	
1.03.1.03.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Tepat Waktu	Kesbangpol	100%	80,000,000	DAU	100%	80,000,000	
1.03.1.03.02.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Output: Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD (Laporan Keuangan, Lakip, LPPD, Laporan Realisasi Anggaran dan kinerja per bulan) yang disusun	Kesbangpol	4 Laporan	30,000,000		4 Laporan	30,000,000	
	Penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran OPD	Output : Jumlah Rencana Kerja (Renja, RKT, Renstra) Perjanjian Kinerja (PK), dokumen Anggaran (RKA & DPA Awal, RKA dan DPA Perubahan) yang disusun	Kesbangpol	8 Dokumen	50,000,000		8 Dokumen	50,000,000	
						DAU			
1.03.1.03.02.34	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase jumlah potensi konflik sosial yang dapat dicegah	Kesbangpol	100%	250,000,000	DAU	100%	400,000,000	
1.03.1.03.02.34.08	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Pembekalan FKDM	Terbentuknya Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah	Kesbangpol	0 Tim	-	DAU	1 Tim	150,000,000	
		Terbentuknya FKDM dan Pembekalan FKDM		0 Tim			1 Tim		

		Tersosialisasinya Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan FKDM		0 orang		DAU		150 orang		
1.03.1.03.02.34.	Kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah*	1. Terlaksananya fasilitasi Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah	Kesbangpol	1 Tahun	100,000,000	DAU	Permeng dagri Nomor 2 Tahun 2018	12 kegiatan	100,000,000	
		2. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama TKDPD								
		Terpantaunya dan terkendalinya kantrantibmas 17 diwilayah kecamatan								
1.03.1.03.02.34.10	Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Daerah Tingkat Kabupaten	Terlaksananya operasional dan koordinasi tim penanganan konflik sosial di Kabupaten Padang Pariaman	Kesbangpol	1 tahun	150,000,000			1 tahun	150,000,000	
		Terpantaunya dan tertanganinya koflik sosial di Kabupaten Padang Pariaman								
1.03.1.03.02.36	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase gangguan keamanan yang dapat diredam	Kesbangpol	100%	50,000,000	DAU		100%	160,000,000	
1.03.1.03.02.36.04	Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Aparatur Ormas/LSM, Guru dan Generasi yang mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan	Kesbangpol	100 orang	50,000,000			100 orang	50,000,000	
		Meningkatnya wawasan Aparatur Ormas/LSM, Guru dan Generasi dalam rangka pembinaan wawasan kebangsaan				DAU				
1.03.1.03.02.36....	Penguatan wawasan bela negara	Terlaksananya penguatan wawasan bela negara	Kesbangpol	60 orang	-	DAU		60 orang	35,000,000	

1.03.1.03.02.36.03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Generasi muda yang mengikuti sosialisasi pewarisan nilai-nilai luhur bangsa	Kesbangpol	150 Orang	-	DAU		100 Orang	75,000,000	
		Meningkatnya wawasan generasi muda tentang nilai-nilai luhur bangsa								
1.03.1.03.02.36.08	Forum Pembauran Kebangsaan	Terlaksananya Forum Pembauran Kebangsaan	Kesbangpol	1 Tahun	-	DAU		1 Tahun	-	
		Meningkatnya rasa toleransi antar suku bangsa								
1.03.1.03.02.39	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Jumlah kasus narkoba	Kesbangpol	25 kasus	180,000,000			25 kasus	415,000,000	
1.03.1.03.02.39.01	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Terlaksananya Penyuluhan pencegahan peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba	Kesbangpol	100 Orang	55,000,000	DAU		200 Orang	100,000,000	
		Meningkatnya kesadaran generasi muda akan bahaya Narkoba dan sejenisnya.	Kesbangpol							
1.03.1.03.02.39.09	Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) di Kabupaten Padang Pariaman	Terlaksananya Peringatan HANI di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018	Kesbangpol	1 kali	65,000,000	DAU		1 kali	65,000,000	
		Meningkatnya kesadaran masyarakat akan bahaya Narkoba dan sejenisnya.	Kesbangpol			DAU				
1.03.1.03.02.39.10	Operasional BNK	- Razia BNK sekaligus Penyuluhan Anti Narkoba	Kesbangpol	3 Sekolah	60,000,000	DAU		3 Sekolah	250,000,000	

		- Tes Urine Bagi Pejabat Eselon II, III.a dan Anggota DPRD Kab. Padang Pariaman	Kesbangpol	0		DAU		150 orang	
		-Terlaksananya Razia BNK sekaligus Penyuluhan Anti Narkoba dan tes Urine Bagi Pejabat Eselon II, III.a dan Anggota DPRD Kab. Padang Pariaman							
		- Pembinaan kepada Kampung Korong Bebas dari Pengguna Narkoba	Kesbangpol	0				1 Korong	
1.03.1.03.02.40	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase Laporan pertanggungjawaban Parpol tepat waktu	Kesbangpol	13 partai politik	304,000,000	DAU		13 partai politik	410,000,000
		Persentase jumlah partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum		60%		DAU		60%	
		Persentase jumlah partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum		70%		DAU		70%	
1.03.1.03.02.40.10	Pembinaan dan Pengawasan Bantuan dana Partai Politik	Verifikasi administrasi persyaratan pengajuan bantuan dan pengawasan penggunaan dana bantuan parpol	Kesbangpol	13 Parpol	25,000,000	DAU		13 Parpol	25,000,000
		Terealisasinya bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD							

1.03.1.03.02.40.11	Pembekalan Pengajaran dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol	Workshop/Bimtek Pembekalan Pengajaran dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol	Kesbangpol	33 orang	75,000,000	DAU		33 orang	75,000,000	
		Meningkatnya pengetahuan dan wawasan pimpinan parpol dan aparatur dalam proses pengajuan dan pertanggung jawaban bantuan keuangan parpol								
1.03.1.03.02.40.13	Updating dan Komputerisasi Data Ormas, Monitoring dan Evaluasi Ormas/LSM	Terlaksananya Updating dan Komputerisasi Data Ormas, Monitoring dan Evaluasi Ormas dan LSM	Kesbangpol	1 Dokumen	25,000,000	DAU		1 Dokumen	75,000,000	
		1. Tersedianya data Ormas/LSM sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan								
		2. Terpantaunya aktifitas Ormas/LSM di Kabupaten Padang Pariaman								
1.03.1.03.02.40.14	Dialog Politik Bersama Pimpinan Partai Politik dan Tokoh Masyarakat.	Terlaksananya Dialog Politik Bersama Pimpinan Parpol dan Tomas	Kesbangpol	100 orang	50,000,000	DAU		150 orang	100,000,000	
		Terjalannya komunikasi antara pimpinan partai politik dan tokoh masyarakat								
1.03.1.03.02.40	Sosialisasi Undang-undang Politik bagi Pemilih Pemula	Sosialisasi Undang-undang Politik Bagi Pemilih Pemula dalam rangka menghadapi Pemilu 2019	Kesbangpol	0%	-	DAU		-	-	

1.03.1.03.02.40	Rapat Koordinasi Pelaksanaan dan Pemantauan Pelaksanaan Pemilu, Pilpres dan Pemilu Kada	Terlaksananya Koordinasi dan pemantauan pelaksanaan pemilihan umum	Kesbangpol	2 kali	60,000,000	DAU		2 kali	60,000,000	
		Rapat Koordinasi antar pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan dan pemantauan pemilu legislatif dan pilpres 2019								
1.03.1.03.02.40	Fasilitasi Tim Pemantauan Pelaksanaan Pemilu, Pilpres dan Pemilu Kada	Terfasilitasinya Tim Pemantauan pelaksanaan pemilihan umum	Kesbangpol	3 kali	69,000,000	DAU		-	-	
		terpantaunya pelaksanaan pemilu, pilpres dan pemilu kada oleh Tim Pemantau yang aman terkendali								
1.03.1.03.02.40	Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Keormasan	Terlaksananya Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Keormasan	Kesbangpol	0%	-	DAU		75 Orang	75,000,000	
		Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Pengurus Ormas akan fungsi dan peran serta Ormas dalam kehidupan bernegara								

**BAB IV
PENUTUP**

RENJA Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 yang secara umum maupun secara khusus disusun sebagai acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD sekaligus ukuran keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan-kegiatan serta program-program pembangunan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020. Tingkat keberhasilan dalam pencapaian sasaran target yang ditetapkan akan menyesuaikan manakala anggaran yang dibutuhkan mengalami perubahan.

Selanjutnya Rencana Kerja (Renja) Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Padang Pariaman dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD serta sebagai acuan dalam menyusun Program/Kegiatan Pembangunan SKPD dalam kerangka penyusunan RAPBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh staf Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Padang Pariaman dan diiringi peran aktif stakeholder pembangunan Kabupaten Padang Pariaman. Tanpa adanya kerjasama yang harmonis maka pencapaiannya tidak akan optimal. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Parit Malintang, April 2019
KEPALA KANTOR KESBANG DAN POLITIK
KABUPATAEN PADANG PARIAMAN

HASAN BASRI, S.Sos
NIP. 19640915 198903 1 013